

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejarah membuktikan bahwa pada saat terjadi krisis pada tahun 1997/1998 telah membuat usaha berskala besar tidak mampu menahan terpaan krisis moneter. Dimana pada saat itu banyak perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan atau pailit yang disebabkan oleh mahalanya bahan baku impor. Tidak hanya harga bahan baku yang naik drastis tetapi pajak impor dari bahan baku tersebut juga ikut naik. Selain itu, kebangkrutan usaha skala besar terjadi karena meningkatnya cicilan utang karena naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar.¹

Pada saat usaha berskala besar mengalami keterpurukan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan dari krisis moneter tersebut. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang di hasilkan. Sebaliknya, kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Serta sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari Bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan UMKM mampu bertahan. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat

¹Mariana kristianti. "website media pemasaran produk-produk unggulan UMKM di kota Semarang". Dalam jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) vol 13 No. 2, April 2015,h. 186

rendah. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari perekonomian yang sehat.²

Dalam perekonomian suatu negara, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Seiring berkembangnya perekonomian suatu Negara, maka peran UMKM semakin penting.³Di Indonesia, UMKM terbukti memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang mana banyak dari perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sedangkan UMKM mampu bertahan dengan kondisi krisis tersebut. Selain itu, sektor ini mampu meningkatkan pendapatan per kapita atau PDB masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.⁴

Pandemi corona (Covid-19) benar-benar memukul bisnis, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Betapa tidak, mereka harus menghadapi kenyataan anjloknya pemasaran akibat berkurangnya pembeli yang bertumpuk dengan terpukulnya daya beli masyarakat. Kondisi ini bukan mengada-ada. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga pertengahan April ini tercatat sekitar 37.000 pelaku UMKM melaporkan keterpurukan yang mereka alami. Jumlahnya tentu akan membesar seiring lamanya. pembatasan sosial berskala besar (PSPB) di sejumlah daerah. Pemerintah harus segera merespons keluhan pelaku UMKM dengan

² ibid

³Achmad Rifa'i, dan Catharina Tri Anni, *Psikologi Pendidikan*, Semarang: Universitas Negeri Semarang Press:2010. hal.67

⁴ ibid

menyelamatkan mereka, baik dengan memberi bantuan sosial untuk kehidupan mereka sehari-hari maupun bantuan modal agar mereka bisa tetap bisa menggerakkan usahanya.⁵

Pandemi global yang terjadi pula di Indonesia membuat banyak pihak berupaya ikut berperan serta dalam mengatasi. Para dokter umum dan spesialis angkat bicara bersama guna memberi penjelasan singkat kepada masyarakat maupun imbauan agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekaligus tak banyak keluar rumah. Salah satu dampak pandemi Covid-19 ialah UMKM di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi Covid-19. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor UMKM yang terguncang selama pandemi Covid-19 selain daripada makanan dan minuman, juga adalah industri kreatif dan pertanian.⁶

⁵Sindonews.com, "Terpuruk karena Pandemi Covid-19, Selamatkan UMKM", diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/12183/33/terpuruk-karena-pandemi-covid-19-selamatkan-umkm-1588201471?showpage=all>, pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 19.00

⁶Andi Amri. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*. Universitas Hasanuddin, hal 125

Dalam masa pandemi Covid-19, Kota Padang terus giat mengembangkan UMKM untuk dapat bertahan dan dapat menghidupkan perekonomian masyarakat terdampak. Seperti pada berita online yang dimuat oleh Info Publik.id sebagai berikut :⁷

Pandemi Covid-19 membuat sektor ekonomi lumpuh. Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terpukul karena tidak berproduksi akibat adanya pembatasan aktivitas. Namun, memasuki era new normal, sektor UMKM mulai berangsur-angsur pulih dan kembali menggeliat. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Rina Melati, saat wabah Covid-19 melanda Kota Padang, hampir semua UMKM di Kota Padang terdampak Covid-19. “Dari puluhan ribu UMKM yang ada di Kota Padang, sekitar 80 persennya merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini.

Fenomena berkembangnya pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 ini tentunya menjadi acuan bagi peneliti untuk mendalami pembahasan terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Padang terhadap UMKM yang mengalami dampak pandemi. Seperti pada berita *online* dibawah ini :⁸

Berkat kesuksesan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang sejauh ini, di tahun 2020 ini Pemerintah Kota Padang kembali dianugerahi penghargaan 'NatamuktiAward' untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut. Mengingat situasi dan kondisi pandemi Covid-19, penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerjasama dengan International Council For Small Business (ICSB) Indonesia itu, diterima secara virtual oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam acara penganugerahan ICSB Indonesia City Award 2020, Kamis pagi tanggal 17 September 2020. Hadir menyerahkan penghargaan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Juga terlihat Hermawan Kartajaya selaku President of ICSB Indonesia atau Inisiator Penghargaan Natamukti serta sejumlah kepala daerah penerima penghargaan.

⁷Infopublik.id, “Sektor UMKM di Kota Padang Mulai Menggeliat”, diakses dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/468341/sektor-umkm-di-kota-padang-mulai-menggeliat> diakses 16 Desember 2020 pukul 22.34 WIB

⁸Berita Minang, “Sukses Kembangkan UMKM, Pemko Padang Kembali Raih Penghargaan Natamukti Award 2020” diakses dari <https://www.beritaminang.com/berita/6933/sukses-kembangkan-umkm-pemko-padang-kembali-raih-penghargaan-natamukti-award-2020.html> pada 26 Januari 2021 pukul 10.00

Seperti diketahui, penghargaan Natamukti diberikan kepada kota atau kabupaten yang berhasil dalam memasarkan, mendorong peningkatan kualitas, serta membangun ekosistem UMKM daerahnya. Untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hanya 3 (tiga) daerah yang menerima penghargaan. Selain Kota Padang yakni juga diikuti Kota Padang Panjang dan Payakumbuh. Seperti yang disampaikan oleh Walikota Padang bahwa :⁹

“...Capaian dan prestasi ini berkat kerja keras kita semua, terutama OPD terkait khususnya Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang. Serta kedepannya Pemko Padang akan terus meningkatkan sinergi dan pembinaan, sehingga UMKM di Kota Padang terus berkembang untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.”

Oleh sebab itu pemerintah Kota Padang dengan giat dan bersemangat untuk memajukan dan mengembangkan lagi usaha mikro, kecil menengah yang ada di Kota Padang guna untuk mensejahterakan kehidupan dan menstabilkan perekonomian masyarakat yang ada di Kota Padang.

Untuk triwulan II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Padang berada di titik terendah, yakni -4,91 persen. Kondisi ini berbanding terbalik di akhir tahun 2019, yang masih menunjukkan kisaran 5,05 persen (Press Realease BPS Kota Padang 5 Agustus 2020). Bisa dikatakan, pada tahun 2020 pembangunan ekonomi mangkrak, karena dihantam wabah Covid-19.¹⁰

Pemerintahan Indonesia mendukung pengembangan UMKM dalam bentuk seperti adanya bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman KUR, adanya Dinas Koperasi dan UMKM pada setiap provinsi/kota untuk memantau perkembangan UMKM, adanya program pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan kreatifitas UMKM dan lainnya. Pengembangan UMKM ditingkat provinsi/kota juga lainnya.

⁹ ibid

¹⁰Donaa Ikranova Febrina, 2020. UMKM di Kota Padang Dihempas Covid-19 Antara Dilema dan Harapan. *Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning* 2(1) 2020 p-ISSN: 2301-8887, e-ISSN: 2714-7738, hal 28

Pengembangan UMKM ditingkat provinsi/kota juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan daerah (diskopumkm.sumbarprov).

Berikut data perkembangan UMKM di Kota Padang dari tahun 2018 sampai tahun 2020 :

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM Binaan di Kota Padang

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah	10.211	11.365	11.723

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tahun 2020

Data tabel 1.1 menampilkan bahwa setiap tahun UMKM binaan di Kota Padang mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang berupaya agar pelaku usaha di Kota Padang tidak berhenti dalam beroperasi. Karena dalam masa pandemi pelaku UMKM banyak yang tidak produktif, maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar tetap produktif. Dengan memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19, pelaku UMKM dibina dan diarahkan kepada pembuatan masker. Hal ini juga disampaikan oleh Walikota Padang sebagai berikut :¹¹

“...Ada sekitar 80 ribu UMKM yang harus kita kembangkan. Oleh sebab itu, melalui penghargaan ini kita jadikan sebagai semangat untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan UMKM Kota Padang ke depan. Kita tentu berharap, meski sekarang sedang dilanda wabah pandemi Covid-19, UMKM di Kota Padang harus tetap bergerak. Maka itu kita perlu melakukan langkah-langkah strategis guna sektor UMKM kita tetap bergerak dalam kondisi apapun.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan Walikota Padang tersebut Pemerintah Kota Padang berupaya menjadikan penghargaan yang telah didapatkan selama dua tahun

¹¹ibid

berturut-turut oleh Kota Padang sebagai motivasi agar Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang untuk menjalankan langkah-langkah strategis guna Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kota Padang untuk terus bergerak dalam kondisi apapun, terutama memberdayakan UMKM agar dapat tetap bertahan di tengah kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Serta dengan kelangkaan persediaan masker pada awal bulan Maret yang membuat pelaku UMKM di Kota Padang tergerak untuk memproduksi masker.¹²

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ada sekitar 2.062 unit UMKM yang akan dikembangkan ke depannya yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian khususnya pada masyarakat Kota Padang. Dari data di atas, warung serba ada (Waserba) merupakan jenis usaha yang banyak di Kota Padang yaitu sebanyak 743 usaha, diikuti oleh jenis usaha kuliner sebanyak 369, jasa sebanyak 354, industri makanan ringan (IMR) sebanyak 308 dan jenis usaha lainnya.¹³

Pada akhir Maret hingga awal April, sebanyak 11.111 Koperasi dan UMKM di Kota Padang menjerit akibat wabah Covid-19. Ribuan pelaku usaha itu mengeluhkan omzet penjualan turun drastis selama pandemi (*Haluan*, 9 April 2020). Para Pelaku UMKM pada April 2020 mulai mengeluhkan penjualan, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat (*Padang Ekspres*, 10 April 2020). Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, jumlah yang terdampak virus.¹⁴

¹²Padangkita.com, Atasi Kelangkaan, UMKM di Padang Ikut Produksi Masker Kain. Dalam <https://padangkita.com/atasi-kelangkaan-umkm-di-padang-ikut-produksi-masker-kain/>, diakses pada 23 Maret 2021 pukul 11.00

¹³Febrina, Donaa. 2020. UMKM di Kota Padang Dihempas Covid-19 Antara Dilema dan Harapan. *Jurnal PublicAdministration, Business andRural Development Planning* 2(1) 2020 p-ISSN: 2301-8887, e-ISSN: 2714-7738, hal 31

¹⁴Ibid, hal 32

Pasca diumumkannya *new normal*, UMKM Kota Padang mulai menggeliat, terutama sejak 13 Juni 2020 lalu. Bahkan menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, bahwa hampir sekitar 50 persen atau sekitar 3894 sektor mikro kembali beraktivitas (*Padang Ekspres*, tanggal 10 Juli 2020). Meskipun begitu, UMKM yang sudah bergerak masih belum memperoleh pendapatan yang maksimal. Sementara itu, untuk 3911 Usaha Ultra Mikro jauh menurun pendapatannya. Diketahui, sampai saat ini Usaha Ultra Mikro masih belum berjalan seperti biasanya. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena masih belum berjalannya sistem belajar di sekolah seperti biasanya. Untuk Usaha Ultra Mikro umumnya berada di sekolah. Sejak diumumkannya aktivitas belajar-mengajar berada di rumah, pemilik usaha masih belum bisa bergerak.¹⁵

Untuk mengurangi dampak pandemi yang dialami oleh UMKM di Kota Padang, pemerintah berusaha untuk menumbuhkan UMKM agar tidak tergerus karena pandemi. Hal ini tergambar pada berita online berikut :¹⁶

“...Dinas Koperasi dan UMKM Padang memberdayakan pelaku usaha mikro untuk memproduksi sekitar 300 ribu masker di tengah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Padang, Sumatera Barat. Seperti pernyataan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tengah memberdayakan sekitar 500 pelaku usaha mikro yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang untuk memproduksi 300 ribu masker.”

Hal ini didukung dengan penjelasan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam wawancara sebagai berikut :

“...karena situasi pandemi sekarang ini, banyak pelaku UMKM yang tidak produktif, terutama yang bergerak di bidang kuliner dan pakaian.

¹⁵Ibid. hal 35

¹⁶ Antara Sumbar, Penuhi kebutuhan masker, Dinas Koperasi dan UMKM Padang berdayakan pelaku usaha mikro, Dalam <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/357792/penuhi-kebutuhan-masker-dinas-koperasi-dan-umkm-pang-berdayakan-pelaku-usaha-mikro>. Diakses pada 19 Maret 2021 pukul 10.30

Maka dari itu, kami dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, berupaya memberdayakan para pelaku usaha untuk tetap produktif, dengan mengarahkan mereka pada pembuatan masker, dan juga mendukung upaya pencegahan Covid-19.” (wawancara dengan Buk Rina Melati, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pada tanggal 14 Oktober 2020).

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Permodalan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, sebagai berikut :

“...kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Padang dalam pembuatan masker dilakukan sebagai bentuk tanggap darurat karena terjadinya pandemi Covid-19, dampak dari pandemi ini, banyak UMKM yang tidak produktif, maka dari itu, kami berupaya agar perekonomian masyarakat tetap berjalan selama masa pandemic, dengan memberikan pembinaan dan pendampingan ke pada UMKM dalam pembuatan masker. Bentuk dari kegiatannya adalah, menunjuk ketua kelompok pelaku usaha mikro yang berkemampuan dalam bidang menjahit, dan pelaku UMKM yang tidak memiliki kemampuan menjahit, bertugas menyetrika dan melakukan pengemasan produk masker.” (wawancara dengan Buk Yessi, Kepala Seksi Permodalan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pada tanggal 17 Desember 2020)

Terkait dengan pemberdayaan UMKM di masa darurat pandemi termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal BAB VIII Pengadaan Khusus Bagian Kesatu tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pasal 59, poin 1(satu) yang menjelaskan bahwa keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, kemudian keadaan darurat berkaitan dengan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, serta akibat dari kerusakan yang ditimbulkan bencana berdampak pada kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Selanjutnya keadaan darurat yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan

ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri. Serta pengadaan barang atau jasa yang ditujukan pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.¹⁷

Terkait dengan pendanaan pemberdayaan pada masa darurat dimuat pada pasal 5 yang berbunyi :¹⁸

“Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.”

Pasal ini diartikan bahwa penyedia terdekat dalam hal ini adalah pemerintah daerah atau tingkat provinsi. Terkait pendanaan pemberdayaan pada masa darurat juga dijelaskan oleh Kepala Seksi Permodalan Peremberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam wawancara sebagai berikut :

“...dana yang dianggarkan untuk pemberdayaan ini berasal dari insentif pemerintah daerah, karena pandemi, alokasi dana dialihkan untuk penanggulangan covid-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan dana insentif sebesar 1,5 miliar. Kegiatan pemberdayaan UMKM dilaksanakan selama 12 hari berdasarkan kontrak dengan ketua kelompok UMKM yang ditunjuk, masker yang dibuat berdasarkan standar yang ditetapkan Dinas Kesehatan, ukuran, jenis kain, dan lipatan sesuai dengan standar. Untuk membuat masker para pekerja yang adalah pelaku UMKM yang terdata sejumlah 576 orang, karena kejar target, ketua kelompok menambah pekerja yang tidak terdaftar sekitar 600 sampai 700 orang. Sistemnya, setelah 12 hari dan masker selesai dibuat dan siap di salurkan, uang dibayarkan kepada pelaku UMKM, kan dengan uang tersebut para pelaku UMKM masih bisa bertahan. (wawancara dengan Buk Yessi, Kepala Seksi Permodalan Peremberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pada tanggal 17 Desember 2020)

¹⁷Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁸Ibid.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Permodalan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM di masa pandemi menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pelaku UMKM yang mengalami keterpurukan dapat berusaha dan terbantu dalam permasalahan perekonomian. Berikut daftar UMKM penjahit masker binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang :

Tabel 1.2

Daftar UMKM Penjahit Masker

No	Nama Usaha	Jumlah Masker	Tenaga Kerja
1	Fabio Karya	14.000	10
2	Rumah Jahit Kucindan	10.000	21
3	Oyong Konveksi	7.500	20
4	Maya Masker	26.250	18
5	Rama Collection	5.000	15
6	KatanaSeprai	3.000	10
7	Poppy Craft	7.500	10
8	Intan Bedcover	10.000	80
9	Baringin Jaya	10.000	35
10	Tampuo	19.000	42
11	Anisa Tali Ameh	19.500	45
12	Aya Bedsheet	3.000	24
13	Er Border	26.250	30
14	D'kartinis	5.000	25
15	Sari Serumpun	5.000	34
16	Karoma Fashion	6.000	20
17	Fay Collection	15.000	25
18	HauriyahHalum	17.000	15
19	Bank Sampah Asy-Syifa	8.000	10
20	Risa Colection	21.000	51
21	R3 Colection	7.000	20
Jumlah		245.000	575

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tahun 2020

Selain kegiatan pembuatan masker, kegiatan pemberdayaan juga dilakukan melalui pelatihan kepada UMKM terutama kategori rumah tangga miskin. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Permodalan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam wawancara sebagai berikut :

“...di samping membuat masker, kita sudah melakukan persiapan jikalau pandemi berakhir, kami berikan pelatihan kepada pelaku UMKM yang bergerak dibidang kuliner, kegiatan tersebut dilakukan selama 3 hari, kami berikan pelatihan bagaimana agar produk UMKM dapat dilirik, kita latih dengan standar makanan hotel. Jika ada acara pertemuan pejabat atau pun rapat, biasanya mereka lebih memilih produk yang sudah laku di pasaran, dan sekarang kita berupaya agar produk UMKM dapat bersaing dengan produsen besar.” (wawancara dengan Buk Yessi, Kepala Seksi Permodalan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pada tanggal 17 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Permodalan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dapat dilihat kegiatan pemberdayaan tidak sebatas satu kegiatan saja. Kegiatan pemberdayaan dilakukan agar pelaku UMKM dapat bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar.

Berdasarkan data terkait dengan pemberdayaan UMKM di masa pandemi di Kota Padang, terlihat pemerintah Kota Padang dengan perpanjangan tangan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang berupaya agar pelaku UMKM di Kota Padang dapat bertahan di masa pandemi, karena tidak semua sektor dapat bertahan ditengah kondisi dimana masyarakat akan lebih mementingkan kesehatan dari pada hal lain. Dan usaha Dinas UMKM memberdayakan pelaku UMKM dalam membuat masker dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi. Berikut proses pembuatan masker UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang :

Gambar 1.1
Proses Pembuatan Masker UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang



Sumber : Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tahun 2020

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis permasalahan yang terjadi menggunakan konsep tahap-tahap pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh Sulistiyani. Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memberikan penyadaran kepada pelaku usaha di Kota Padang dengan memanfaatkan kondisi pandemi yang terjadi. Memberikan pemahaman bagaimana cara agar tetap produktif dimasa keterpurukan perekonomian. Langkah yang ditempuh oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang adalah dengan mengarahkan pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 dalam memproduksi masker. Dengan kegiatan ini diharapkan perekonomian pelaku usaha dapat terbantu ditengah masa krisis.

Pada tahap transformasi kemampuan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang bertugas dalam memberikan pelatihan dan pemdampingan kepada pelaku usaha dalam pembuatan masker. Karena tidak semua pelaku usaha memiliki keahlian dalam menjahit.

Dalam pembuatan masker Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mengikuti aturan standar masker yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terkait dengan ukuran, jenis kain, dan lipatan masker.

Pada tahap peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan dan terbentuknya inisiatif dan inovatif mencapai kemandirian. Pada tahap ini, setelah masker diproduksi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang membayarkan upah kepada pelaku usaha yang memproduksi masker dan memutuskan kontrak dengan kelompok usaha yang bertugas menghasilkan masker. Dengan upah yang diterima oleh pelaku usaha yang terdampak diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, menjadikan para pelaku usaha menjadi mandiri dengan modal yang dimiliki, pelaku usaha dapat kembali menumbuh kembangkan usaha yang dijalani, dengan membuka usaha yang berguna di masa pandemi, sehingga UMKM di Kota Padang dapat bertahan di tengah kondisi pandemi.

Alasan peneliti menggunakan tahapan pemberdayaan menurut Ambar karena sesuai dengan fenomena yang peneliti temukan pada saat melakukan wawancara awal dan juga berdasarkan data serta temuan peneliti di lapangan. Berdasarkan berbagai fenomena yang peneliti temukan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan UMKM terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada di dalam latar belakang dan permasalahan yang terjadi maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberdayaan UMKM terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pemberdayaan UMKM terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

1.4.Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang nantinya memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan sekaligus memberikan kontribusi dalam Administrasi Publik, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi dalam penelitian terkait selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan, memberikan masukan dan menjadi sumbangan pikiran bagi instansi pemerintah terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam pemberdayaan pelaku UMKM sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan organisasi.